


 GRAHA ILMU

 bukubeta

KAJIAN KONFLIK dan PERDAMAIAAN

Editor:
Anak Agung Banyu Perwita
Nabilla Sabban

Globalisasi, Pembangunan Ekonomi dalam Kajian Konflik dan Perdamaian

Ikhtisar

Bab ini menjelaskan hubungan antara ekonomi (globalisasi dan pembangunan ekonomi) dengan konflik. Pemaparan akan dimulai dengan pembahasan dua model pendekatan dalam tradisi hubungan internasional (HI) untuk memahami keterkaitan antara ekonomi dan konflik disertai dengan ilustrasi beberapa kasus. Tentunya tidaklah cukup membahas ekonomi dari sudut pandang konflik *an sich*, alternatif resolusi konflik atau penciptaan perdamaian dengan perangkat ekonomi akan diulas setelahnya. Pembahasan khusus terkait isu pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan konflik akan menjadi penutup bab ini.

Pengantar

Kapasitas ekonomi merupakan salah satu elemen penting bagi kekuatan nasional sebuah negara. Maka tak heran, sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik dan peperangan terjadi demi penguasaan sumber-sumber ekonomi vital: cadangan air dan perairan strategis, daratan yang subur, emas, minyak dan sebagainya. Sejak peperangan antar imperium pada abad ke-16, antar bangsa pada Perang Dunia pertama dan kedua hingga konflik domestik pasca perang dingin-Angola, Chechnya, Congo, Liberia termasuk Indonesia- motif ekonomi selalu memegang peranan amat penting. Bahkan banyak analis menilai kompetisi memperebutkan kontrol atas minyak dan jalur penyalurannya menjadi penyebab Perang Teluk I tahun 1991 dan invasi Amerika Serikat atas Irak pada tahun 2003. Tren konflik atas sumber daya ekonomi sepertinya tidak akan menyurut, dalam laporan yang dirilis oleh Wilton Park, sebuah lembaga berbasis di Inggris pemrakarsa serial dialog global sejak Perang Dunia II, menyatakan 3 hal yang akan menjadi penyebab utama konflik di masa depan (2030) yaitu demografi, perubahan iklim, dan ekonomi.

Di sisi lain, imbas konflik terhadap pembangunan ekonomi tidak pernah lepas dari kekhawatiran kita. Perang selalu menjadi sebuah bisnis yang mahal yang menguras sumber daya. Pembangunan ekonomi di Somalia, Irak dan Afganistan tersendat dikarenakan konflik yang berkepanjangan. Tidak hanya negara miskin, Joshua S. Goldstein (2004) seorang professor HI di American University Amerika Serikat (AS) menulis bagaimana *War on Terror* telah menghisap dana pajak dan mengancam masa depan kesejahteraan warga AS sebagai salah satu negara maju.

Kedua alinea tersebut di atas merupakan gambaran ragam pendekatan bagaimana hubungan antara ekonomi dan konflik dipahami. Model pendekatan pertama melihat ekonomi-pembangunan ekonomi dan globalisasi- sebagai variabel independen bagi terciptanya konflik. Konflik muncul setelah diawali dengan kegagalan pembangunan ekonomi atau globalisasi. Pendekatan ini saya sebut sebagai model pendekatan konflik sebagai *posterior*. sedangkan model pendekatan kedua melihat konflik sebagai variabel independen bagi musnahnya kesejahteraan ekonomi dan kandasnya pembangunan. Konflik

muncul di awal yang kemudian diikuti oleh kemunduran ekonomi dan kemiskinan. Model pendekatan kedua ini saya sebut sebagai model pendekatan konflik sebagai *anterior*.

Dari kedua ragam pendekatan tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang layak kita ajukan; sejauhmana hubungan keduanya meniscayakan sebuah hubungan sebab-akibat? Jika ya, apakah hubungannya bersifat universal atau mensyaratkan konteks tertentu?

Konflik sebagai posterior

Pembangunan ekonomi merupakan ikhtiar rekayasa sumber daya demi tercapainya kesejahteraan material manusia. Perekayasaannya ini menjadi semakin intensif dan lintas batas negara dengan ada globalisasi. Kenyataan menunjukkan usaha ini tidak selalu menunjukkan hasil yang diharapkan, bahkan yang lebih parah kegagalannya justru melahirkan permasalahan baru, yaitu konflik.

Dalam literatur, hubungan antara ekonomi, globalisasi dan perdagangan dengan konflik bisa dipetakan menjadi 4 kelompok: 1) argumen kaum liberal bahwa perdagangan internasional mutlak menciptakan perdamaian, 2) golongan neo-marxis dan neo-realis berargumen bahwa hubungan dagang yang simetris berujung kepada perdamaian, sedangkan yang asimetris menciptakan konflik, 3) argumen bahwa perdagangan selalu menimbulkan konflik, dan 4) bagi sebagian kaum realis, ekonomi/perdagangan tidaklah relevan dengan terjadinya konflik. Bab ini akan lebih membahas mengenai relevansi pembangunan ekonomi dan globalisasi dengan konflik.

Pembahasan bagaimana kondisi ekonomi memunculkan konflik sangatlah kompleks, akan tetapi 2 frasa kunci yang menjadi fokus para pakar, yaitu ketimpangan dan kelangkaan/keberlimpahan sumberdaya. Ketimpangan terjadi ketika pembangunan ekonomi menyejahterakan sebagian dan mengabaikan sebagian anggota masyarakat yang lain. Ketimpangan terkait dengan malfungsi distribusi sedangkan kelangkaan/keberlimpahan terjadi lebih karena ketidakseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Kedua hal inilah yang dinilai sebagai sumber konflik dari sisi ekonomi.

Ketimpangan. Ketimpangan adalah sebuah fakta sosial yang tidak bisa dipungkiri, akan tetapi ketika kondisi ini menjadi sangat ekstrim, maka konflik lebih dimungkinkan untuk terjadi. Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin tidak hanya terjadi karena aktivitas ekonomi tetapi juga kebijakan publik terkait ekonomi; kebijakan perpajakan, upah minimum, investasi negara dalam pendidikan dan kesehatan rakyatnya dll.

Penelitian para pakar melihat tidak ada korelasi langsung antara indeks Gini dan rasio Palma (perangkat untuk mengukur ketimpangan ekonomi) dengan konflik dan kekerasan. Akan tetapi ditemukan resiko konflik meningkat ketika ketimpangan ini memisahkan kelompok secara horisontal segaris dengan pemisahan identitas lainnya seperti agama, etnis, ras dan kedaerahan. Kelompok yang kaya memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok yang miskin.

Dari survei terhadap 61 negara berkembang oleh Gudrun Østby (2008), ketika ketimpangan kepemilikan aset antar etnis meningkat sebesar 95 persentil (sedang variabel yang lain konstan), probabilitas konflik

meningkat dari 2,3 persen ke 6,1 persen. Sedangkan studi yang sama dengan melihat perbedaan agama antar kelompok, maka probabilitasnya naik drastis dari 2,9 persen menjadi 7,2 persen. Studi yang lain terkait konflik pasca perang dingin oleh Lars-Erik Cederman, Nils B. Weidmann, dan Kristian Skrede Gleditsch (2011) menunjukkan bahwa semakin kaya (atau miskin) sebuah kelompok berbasis etnogeografis dibandingkan yang lain, maka semakin tinggi kemungkinan kelompok tersebut mengalami perang sipil dengan kelompok lainnya.

Dalam konteks konflik antar negara, buku klasik E.H. Carr (2001) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berupa perdagangan internasional tidaklah otomatis menciptakan perdamaian antar bangsa sebagaimana diyakini kaum idealis/liberal. Tatanan ekonomi internasional pasca Perang Dunia I menciptakan ketimpangan di antara negara berpunya dan negara 'proletar' yang berujung kepada terjadinya Perang Dunia II. Perang tersebut muncul sebagai akibat dari konflik kepentingan antara negara status quo yang ingin mempertahankan kondisi tata kuasa dan ekonomi yang ada dengan negara yang ingin merevisi penataan tersebut.

Box 1

Konflik Sampit, Kalimantan Tengah di pertengahan Februari 2001

Dalam hitungan hari, terjadi pembunuhan terhadap sekitar 500 orang beretnis Madura oleh komunitas Dayak. Konflik ini tidak menyisakan seorang Madura pun untuk tetap tinggal di Kota Sampit. Pembersihan etnis ini muncul sebagai akibat proses panjang peminggiran secara ekonomi dan politik kaum Dayak oleh Pemerintahan Orde Baru. Proses ini menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara masyarakat asli, yaitu Dayak dengan masyarakat pendatang, salah satunya adalah orang Madura.

Laporan International Crisis Group (2001) mencatat bahwa meski ketimpangan ekonomi mempunyai peranan dalam konflik ini, ada pertanyaan mendasar mengapa yang menjadi target adalah etnis Madura dan bukan etnis pendatang yang lain seperti Jawa dan Banjar yang juga diuntungkan oleh tatanan ekonomi yang ada. Salah satu jawaban populer adalah *stereotyping* oleh komunitas Dayak terhadap Madura yang dilihat sebagai komunitas yang arogan, eksklusif, tak dapat dipercaya dan kasar. Hal ini menunjukkan ketimpangan tidak otomatis menjadi sumber konflik jika tanpa didorong oleh faktor yang lain.

Kelangkaan/Keberlimpahan. Kelangkaan sumber daya alam muncul sebagai kombinasi dari ketidakmampuan kapasitas internal masyarakat ; teknologi, demografi, kebijakan ekonomi dan politik, dengan perubahan eksternalnya; perubahan iklim, bencana alam, sumberdaya tak terbarukan dsb. Konflik antara masyarakat petani dan penggembala Janjaweed di Darfur, Sudan merupakan salah satu contoh konflik tanah dan sumber air yang muncul sebagai imbas kekeringan panjang yang terjadi.

Thomas Homer-Dixon (1999) membagi kelangkaan dalam tiga jenis penyebab; berubahnya penawaran, meningkatnya permintaan, kelangkaan struktural. Dari sisi penawaran, degradasi lingkungan seperti berkurangnya hutan, kerusakan tanah dan perairan menciptakan kekurangan sumber daya untuk

mencukupi kebutuhan manusia. Dari sisi permintaan, kelangkaan terjadi karena meningkatnya kebutuhan akan barang tertentu yang diawali dengan meningkatnya jumlah penduduk, migrasi dan industrialisasi. Kelangkaan struktural terkait erat dengan isu sebelumnya yaitu ketimpangan. Kelangkaan model ini muncul ketika kontrol terhadap sumber daya alam hanya di tangan orang atau masyarakat tertentu saja. Sebagai contohnya kelaparan bisa terjadi di suatu tempat yang memiliki sumber pangan melimpah akan tetapi tidak bisa diakses oleh semua warga masyarakat.

Yang menarik dalam konteks sumber daya alam atau lingkungan adalah tidak hanya kelangkaan yang terkait dengan munculnya konflik, melainkan keberlimpahan pun dinilai berpengaruh. Michael T. Klare mempublikasikan peta di tahun 2001 yang menunjukkan bukan hanya wilayah dengan keterbatasan sumber daya air tetapi wilayah yang memiliki keberlimpahan sumber mineral dan minyak pun menjadi titik-titik dimana konflik terjadi. Wilayah Timur Tengah dan Afrika yang notabene memiliki mineral melimpah mengalami tingkat konflik dan perang yang cukup tinggi. Film *Blood Diamond* (2006) menggambarkan dengan baik bagaimana konflik antara pemberontak dengan pemerintah di Angola, Pantai Gading dan Sierra Leone dipicu oleh perebutan sumber dan jalur perdagangan berlian.

Para ilmuwan berbeda pendapat sejauhmana keterkaitan antara kelangkaan/keberlimpahan sumberdaya dan konflik. Sebagian ilmuwan seperti Peter Gleick (1991) dan Michael T. Klare melihat hubungan langsung atau sebab akibat antara sumber daya lingkungan dan konflik. Sedangkan yang lain seperti Daniel Deudney (1991) melihat secara berbeda. Degradasi lingkungan justru mendorong beberapa kelompok atau negara berkolaborasi dan tidak berkompetisi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kelangkaan/keberlimpahan sumber daya tidak serta merta menciptakan konflik, akan tetapi ia bisa menjadi pemicu konflik di tempat dimana ketegangan antar kelompok (etnis, kelas, identitas kebangsaan dan agama) itu sudah ada.

Box 2

Kasus Azerbaijan: Negara rawan tetapi tahan terhadap konflik

Azerbaijan adalah sebuah negara kecil pecahan Uni Soviet, bermulti etnis, terkenal sebagai pengeksport minyak yang terletak di kawasan laut Kaspia. Peta Klare menunjukkan daerah Kaspia ini sebagai salah satu titik panas konflik dan instabilitas politik. Keberlimpahan minyak menjadi rebutan antara kekuatan besar Rusia, Turki dan Iran yang merupakan tetangga Azerbaijan. Secara teoritik, dengan kekayaan yang dimiliki dan karakter multi etnisnya, Azerbaijan rentan terhadap terjadinya konflik. Akan tetapi fakta menunjukkan dengan segala perubahan dan ketegangan yang terjadi di kawasan laut Kaspia dan ketegangan etnis di dalam negeri, Azerbaijan relatif cukup stabil.

Sebuah survei menjelaskan bahwa meski derajat ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah cukup tinggi, konflik tidak terjadi. Hal ini karena aktivitas pengelolaan industri minyak bukan menjadi prioritas dan perhatian rakyat kebanyakan dan tidak adanya mobilisasi sosial serta pengorganisasian masyarakat untuk menjawab kekecewaan publik terhadap pemerintah.

Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menyatakan bahwa kelangkaan/keberlimpahan sumber daya alam merupakan pencetus konflik. Bagaimana masyarakat mempersepsikan sumber daya alam atau lingkungan tersebut, adanya mobilisasi sosial, dan adanya kombinasi hal-hal tersebut dengan ketegangan antar etnis atau tidak adalah beberapa hal yang sangat menentukan.

Konflik sebagai anterior

Dalam pendekatan ini, konflik menjadi sebab terjadinya kegagalan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Teori ekonomi berselisih pendapat terkait pengaruh konflik atau perang terhadap pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, berpendapat bahwa perang melumpuhkan kemampuan produktif manusia dan menghancurkan modal yang dibutuhkan pembangunan. Di sisi lain, perang dinilai dapat memobilisasi tenaga kerja sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Penelitian awal terkait dengan hal tersebut dilakukan oleh Robert Barro (1991). Dia meneliti pengaruh dua variabel instabilitas politik yaitu jumlah revolusi dan kudeta per tahun terhadap ekonomi negara. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mempengaruhi penerapan hak milik yang berimbang terhadap menurunnya tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian pengaruh perang sipil terhadap ekonomi dengan model ekonometrik oleh Murdoch dan Sandler (2004) menunjukkan bahwa efek fatal perang sipil relatif pendek yaitu dalam interval 5 tahun. Dalam interval ini pengaruh buruk perang sipil tidak hanya dialami oleh negara yang bersangkutan tetapi juga negara tetangga. Pengaruh tersebut berupa penurunan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan tenaga kerja, berkurangnya aktivitas perdagangan dan FDI.

Dalam penelitian yang lebih mutakhir, Polachek dan Sevastinova (2010) mengkaji data konflik antara tahun 1970-2000 dan menjelaskan bahwa konflik antar negara (*interstate conflict*) mengurangi pertumbuhan ekonomi dari .18 hingga 2.77 poin persentase sedangkan konflik internal negara (*intrastate conflict*) mengurangi dari .01 hingga .13 poin persentase. Secara umum, konflik berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Lebih lanjut, konflik internal atau perang sipil berpengaruh terhadap semua negara yang mengalaminya, dan sangat fatal terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara non demokrasi, berpendapat rendah dan khususnya negara di Afrika. Satu temuan yang menarik adalah konflik antar negara yang dilakukan oleh anggota OPEC justru menambah dan tidak mengurangi pertumbuhan ekonominya. Dengan kata lain, pengaruh konflik terhadap ekonomi sangat bervariasi tergantung tipe dan intensitas konfliknya demikian pula tipe, kekayaan, dan kebijakan masing-masing negara. Pembahasan lebih lanjut terkait pengaruh konflik terhadap pembangunan manusia khususnya pemberdayaan perempuan akan dipaparkan pada bagian konflik dan pemberdayaan perempuan.

Box 3.

Afghanistan: negara dengan ekonomi yang mahal

Agustinus Wibowo(2011), seorang penulis asal Indonesia yang berkelana ke pelosok-pelosok Afghanistan pada tahun 2006, menyebut bahwa semua barang disana mahal kecuali satu, yaitu nyawa manusia. Meski sudah sejak zaman Iskandar Agung mengalami perang, invasi Uni Sovyet 1980 pada merupakan awal bagi penyematan Afghanistan sebagai negara perang. Henggangnya Soviet tidak meredakan konflik yang ada, melainkan justru mewariskan pertentangan antar etnis yang masih berlanjut hingga kini. Pemerintahan Taliban sejenak mendinginkan konflik internal ini akan tetapi invasi Amerika Serikat beserta sekutunya pada tahun 2001 semakin menyulitkan negara ini untuk pernah bisa lepas dari konflik dan mulai membangun ekonomi negaranya.

Bom bunuh diri masih terjadi di jalanan Afghanistan. Meski relatif tidak menargetkan rakyat secara langsung dan hanya lembaga asing, tentara dan polisi, insiden-insiden tersebut menjadi penghambat bagi berfungsi optimalnya pasar dan aktivitas perekonomian. Ranjau-ranjau sisa perang masih didapati di ladang-ladang tempat petani beraktifitas. Sebagai ibukota pun, Kabul tidak memiliki infrastruktur yang memadai. jaringan listrik sangatlah terbatas.

Meski saat ini berangsur membaik, Afghanistan belum sepenuhnya pulih. Negara ini sangat menggantungkan ekonominya pada bantuan asing (dan perdagangan opium ilegal). Bantuan asing tetap dipertahankan dengan alasan menghindari terciptanya konflik yang baru. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemutusan bantuan secara drastis akan berimplikasi serius berupa krisis keuangan, hilangnya kemampuan kontrol keamanan, melemahnya otoritas politik dan kemungkinan terjadinya lagi perang sipil. Pihak internasional dan pemerintah Afghanistan sadar, kunci utama bagi pemulihan ekonomi negara tersebut sangat tergantung oleh kemampuannya mencegah terjadinya kembali konflik dan perang sipil.

Perangkat Ekonomi dalam Resolusi Konflik

Ekonomi dan perdagangan bukan hanya berperan menimbulkan konflik, akan tetapi berpotensi sebagai sarana penyelesaian konflik. Bagian ini akan membahas beberapa model resolusi konflik dengan perangkat ekonomi terlepas dengan kontroversi mengenai efektivitasnya.

- a) Perdagangan internasional. Sebagaimana disebut sebelumnya, para pakar berbeda pendapat mengenai peran perdagangan dalam konflik. Pandangan liberal adalah pandangan klasik yang memandang bahwa perdagangan internasional akan menciptakan perdamaian antar bangsa. Immanuel Kant beranggapan bahwa hal ini akan mentransformasi identitas lokal dan nasional menjadi lebih kosmopolitan. Identitas kosmopolitan akan menjadikan konflik dan perang sebagai hal yang boros dan tidak bermakna. Institusi ekonomi pasca PD II semisal GATT/WTO dinilai berperan untuk menjaga perdagangan internasional tetap berjalan. Bagi pendukung pasar bebas, kondisi dunia yang relatif minim perang antar bangsa merupakan bukti bahwa perdagangan internasional cukup efektif dalam menciptakan perdamaian dunia.
- b) Keadilan distributif. Terlepas bahwa ketimpangan ekonomi tidak berkorelasi langsung dengan konflik, penciptaan masyarakat dan sistem internasional yang lebih merata diyakini akan berperan dalam perdamaian. Pola distribusi ekonomi melalui pungutan pajak, filantropi dan bantuan luar negeri ditujukan untuk mengurangi ketimpangan yang ada.

- c) Kebijakan afirmasi. Ketimpangan ekonomi merupakan penyakit yang coba disembuhkan melalui langkah ini. Aksi afirmasi bukanlah perangkat yang murni ekonomis tetapi merupakan kebijakan politik yang dengan sengaja memberi dukungan bagi kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem ekonomi yang ada. Pemberian fasilitas dukungan pemerintah Indonesia bagi pengusaha pribumi dalam pemerintahan Soekarno diharapkan ketimpangan antar kelas dan etnis akan berkurang. Negara lain yang dinilai sukses menerapkan hal ini adalah Malaysia. Pemerintah memberi kemudahan ekonomi bagi etnis Melayu akan bisa sejajar secara ekonomi dengan etnis Cina. Meski terjadi beberapa insiden, kebijakan afirmatif Malaysia cukup berhasil dalam meredam ketegangan antar etnis.
- d) Embargo ekonomi dan divestasi. Dalam film *Darfur Now (2007)* digambarkan bagaimana kelompok-kelompok sipil di AS mengkampanyekan penarikan investasinya dari Sudan demi menekan pemerintah Sudan untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Darfur. Hal yang sama pernah dilakukan untuk mengakhiri rezim apartheid di Afrika Selatan.
- e) Sertifikasi dan label. Perangkat ini memanfaatkan kekuatan konsumen yang makin meningkat. Kanada sebagai salah satu negara penghasil berlian, memonitor semua tahap produksi berlian dan memberi sertifikat bagi berlian yang diproduksi melalui proses yang bebas konflik. Sertifikasi berlian ini bertujuan memberikan insentif bagi pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konfliknya. Jika pihak-pihak tersebut memilih tidak berdamai, maka konsekuensinya produk yang mereka hasilkan akan ditolak oleh pasar dunia. Perangkat ini biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik yang memiliki latar belakang konflik sumber daya alam.

Kesimpulan

Globalisasi dan pembangunan ekonomi memiliki relasi yang tidak sederhana dengan konflik. Sebagai sebuah penyebab, para pakar berbeda pendapat sejauhmana kegagalan globalisasi dan pembangunan ekonomi dalam wujud ketimpangan dan kelangkaan sumber daya menjadi pemicu langsung terjadinya konflik. Sebaliknya, penelitian empiris mutakhir cenderung konsisten untuk memaparkan bukti pengaruh negatif dari konflik terhadap pembangunan ekonomi. Hanya dalam kadar tertentu, perang sipil dan perang antar negara memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Pembangunan ekonomi pun sudah sejak lama digunakan sebagai metode penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian. Meski masih dipertanyakan efektifitasnya, perangkat ekonomi untuk resolusi konflik penting untuk dikembangkan.

Bibliography

Barbieri, K., & Schneider, G. (1999). Globalization and peace: assessing new directions in the study of trade and conflict. *Journal of Peace Research* vol 36, no 4 , 387-404.

Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *Quarterly Journal of Economics* 106(2) , 407-444.

Braun, T. (Director). (2007). *Darfur Now* [Motion Picture].

Brown, R., & Selvadurai, S. (2011). *Global Conflict-Future Trends and Challenges: toward 2030*. Wilton Park (WP1073).

Carr, E. (2001). *The Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations*. New York: Perennial.

Cederman, L.-E., Weidman, N. B., & Gleditsch, K. S. (no. 3 (2011)). Horizontal Inequalities and Ethnonationalist Civil War: A Global Comparison. *American Political Science Review* 105 , 487-489.

Deudney, D. (1991). Environment and security:muddled thinking. *Bulletin of the Atomic Scientist*, 47 (3) , 22-29.

Deudney, D., & Matthew, R. (1999). *Contested Grounds: Security and Conflict in the New Environmental Politics*. Albany, NY: State University of New York Press.

Doyle, M. W., & Stiglitz, J. E. (Spring 2014). Eliminating Extreme Inequality: A Sustainable Development Goal, 2015-2030. *Ethics and International Affairs* .

Gilady, L., & Russett, B. (2010). Peacemaking and Conflict Resolution. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons, *Handbook of International Relations* (pp. 392-408). London: Sage.

Gleick, P. (1991). Environmental and security:the clear connection. *Bulletin of the Atomic Scientist*, 47 (3) , 16-21.

Goldstein, J. S. (2004). *The Real Price of War:How You Pay for the War on Terror*. New York: New York University Press.

Homer-Dixon, T. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*. NJ: Princeton University Press.

Homer-Dixon, T. (1994). Environmental scarcities and violent conflict: evidence from cases. *International Security*, 19 (1) , 5-10.

Homer-Dixon, T., & Blitt, J. e. (1998). *Ecoviolence: Links Among Environment, Population, and Security*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

International Crisis Group (ICG) . (2001). *Communal Violence in Indonesia: Lessons From Kalimantan.* Jakarta/Brussels: ICG Asia Report No 19.

Klare, M. T. (2001). *Resource Wars:The New Landscape of Global Conflict.* New York: Henry Holt and Company.

Klare, M. T. (2001). The new geography of conflict. *Foreign Affairs*, 80 (3) , 49-61.

Murdoch, J. C., & Sandler, T. (2004). Civil wars and economic growth: spatial dispersion. *American Journal Political Science* 48(1) , 138-151.

O'Lear, S. (2010). *Environmental Politics: Scale and Power.* Cambridge: Cambridge University Press.

Østby, G. (2008). Inequalities, the Political Environment and Civil Conflict: Evidence from 55 Developing Countries. In F. Stewart, & ed, *Horizontal Inequalities and Conflict* (pp. 136-157). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Østby, G., & Strand, H. (2013). Horizontal Inequalities and Internal Conflict: The Impact of Regime Type and Political Leadership Regulation. In K. Kalu, U. Uzodike, D. Kraybill, J. Moolakkattu, & eds, *Territoriality Citizenship and Peacebuilding:Prospectives on Challenges to Peace in Africa.* Pietermaritzburg, South Africa: Adonis & Abbey.

Polachek, S. W., & Sevastianova, D. (2010). Does conflict disrupt growth? Evidence of the relationship between political instability and national economic performance . *The Institute for Study of Labor, IZA* (p. Discussion paper no.4762). Bonn: IZA.

Stein, J. G. (2010). Psychological Explanation of International Conflict. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons, *Handbook of International Relations* (pp. 292-308). London: Sage.

The World Bank. (May 2012). *Afghanistan in Transition: Looking Beyond 2014, Volume 2: Main Report.* The World Bank.

Wibowo, A. (2011). *Selimut Debu: Impian dan Kebanggaan dari Negeri Perang Afghanistan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zwick, E. (Director). (2006). *Blood Diamond* [Motion Picture].